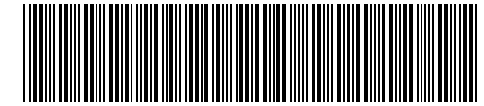




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408834/2022**



DS:0001-2797-6304-6630

Revisi ke 03

Tanggal : 12 April 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (408834) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 963.218.000 (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 963.218.000
Rp. 963.218.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 963.218.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 963.218.000

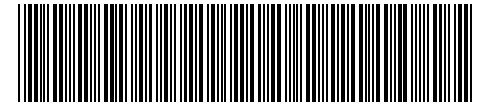
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408834) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	963.218.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	963.218.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408834) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

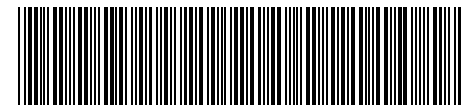
23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	439.240.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10.00	kegiatan	439.240.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	76,00	orang	192.952.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	76.00	orang	192.952.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	331.026.000
Rincian Output	:	01	BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	331.026.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408834) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408834	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	-	963.218	-	-	-	963.218		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	963.218	-	-	-	963.218		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	963.218	-	-	-	963.218		
5252.AEA	Koordinasi (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	439.240	-	-	-	439.240	13 . 51	
01	RM	-	439.240	-	-	-	439.240	042@	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	192.952	-	-	-	192.952	13 . 51	
01	RM	-	192.952	-	-	-	192.952	042@	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	331.026	-	-	-	331.026	13 . 51	
01	RM	-	331.026	-	-	-	331.026	042@	
JUMLAH		-	963.218	-	-	-	963.218		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408834) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408834	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	32.193	0	149.560	164.955	199.424	50.314	101.564	70.785	121.849	38.314	34.259	963.218
		BELANJA BARANG	0	32.193	0	149.560	164.955	199.424	50.314	101.564	70.785	121.849	38.314	34.259	963.218
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	32.193	0	149.560	164.955	199.424	50.314	101.564	70.785	121.849	38.314	34.259	963.218
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	32.193	0	149.560	164.955	199.424	50.314	101.564	70.785	121.849	38.314	34.259	963.218

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
IV A. B L O K I R**



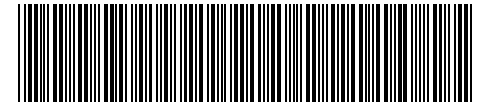
DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408834] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
408834	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK		Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 369.247		Disposisi: Automatic Adjustment
	52 Belanja Barang Rp. 369.247	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	521211	Belanja Bahan(RM)
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.906
5252.AEA	Koordinasi		Automatic Adjustment
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.773	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.880
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adjustment
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.968
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adjustment
	522141 Belanja Sewa(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.320
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adjustment
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.440	521211	Belanja Bahan(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.690
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adjustment
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.176	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.234
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic Adjustment
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.700	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
IV A. B L O K I R**



DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408834] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

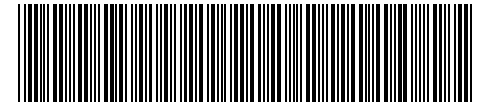
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment	Rp.	56.160		
	Disposisi: Automatic Adjustment				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment	Rp.	2.400		
	Disposisi: Automatic Adjustment				

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408834/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:0001-2797-6304-6630

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408834] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332